

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam bab I ini akan memaparkan beberapa pembahasan yang antara lain meliputi: (a) Latar Belakang Masalah, (b) Rumusan Masalah, (c) Definisi Istilah, (d) Tujuan Kajian, (e) Kegunaan Kajian, (f) Metode Kajian, (g) Penelitian Terdahulu, (h) Sistematika Penulisan.

A. Latar Belakang Masalah

Sungguh melihat kenyataan hidup sudah semakin jauh dari nilai kemanusiaan, landasan agama bukan satu-satunya pilihan hidup yang menjanjikan kedamaian. Ini karena semakin jauh jarak manusia dengan nilai-nilai sakral relegius. Pertanyaannya adalah, siapa yang akan mengembangkan iklim yang sudah mengalami distorsi, pada sebuah iklim yang mempunyai landasan nilai etik dan moral-relegius, sehingga kehidupan kembali menampakkan wajah aslinya, yaitu wajah kemanusiaan.

Selama beberapa generasi, kita telah berusaha menjadikan dunia sebagai tempat yang lebih baik dengan cara menyediakan makin banyak persekolahan. Tapi sejauh ini usaha itu kandas. Yang kita dapatkan dari sana hanya pelajaran bahwa memaksa semua anak untuk memanjat tangga pendidikan yang tak berujung takkan meningkatkan mutu, melainkan pasti hanya menguntungkan individu-individu yang sudah mengawali pemanjatan itu sejak dini, yang lebih sehat, atau lebih siap. Sisanya hampir pasti gagal. Pengajaran yang diwajibkan di sekolah membunuh kehendak banyak orang untuk belajar secara mandiri;

pengetahuan diperlakukan ibarat komoditas, dikemas-kemas dan dijajakan, diterima sebagai sejenis harta pribadi oleh yang menerimanya, dan selalu langka di pasaran.¹

Pendidikan dan pembelajaran di sekolah selama ini dinilai kurang demokratis dan humanis. Kurangnya ruang bagi peserta didik untuk berimajinasi dan berkreasi, menunjukkan eksistensinya dengan perspektif mereka sendiri. Padahal, kreativitas dan kemampuan berpikir kritis merupakan kecakapan yang menjadi modal anak agar mampu menghadapi tantangan yang lebih kompetitif.

Kritik dan keprihatinan tersebut sangat beralasan. Realitas proses pembelajaran yang terjadi di sekolah-sekolah selama ini sama sekali tidak memberikan peluang kepada peserta didik untuk mengembangkan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis mereka. Peserta didik masih saja menjadi objek. Mereka diposisikan sebagai orang yang tertindas, orang yang tidak tahu apa-apa, orang yang harus dikasihani, oleh karenanya harus dijejali dan disuapi. Indoktrinasi terus saja terjadi terhadap anak-anak. Anak-anak terus saja dianggap sebagai bejana kosong yang siap dijejali aneka bahan dan kepentingan demi keuntungan semata. Berpuluh-puluh tahun anak-anak kita dihadapkan pada hafalan kering tanpa adanya kesempatan untuk mengembangkan daya eksplorasi dan kreativitas. Anak-anak dipasung kebebasannya, tidak lagi dilihat sebagai anak (lebih-lebih di pendidikan dasar), tetapi sebagai robot, beo, dan kader politik mini yang hanya tahu melaksanakan perintah tuannya.

¹ Ivan Illich, *Alternatif Persekolahan*, dalam Omi Intan Naomi (ed) *Menggugat Pendidikan, Fundamental, Konservatif, Liberal dan Anarkis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), Cet.IV, hlm. 517.

Pendidikan kita mengalami proses dehumanisasi. Dikatakan demikian karena pendidikan mengalami proses kemunduran dengan terkikisnya nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan yang dikandungnya. Kenyataan ini telah menjadi keprihatinan bersama masyarakat kita. Jangan sampai kondisi demikian akan selalu menggelapkan raut muka dan wajah buruk pendidikan kita. Sudah saatnya, reformasi pendidikan perlu untuk segera dan secara masif diupayakan, yaitu gagasan dan langkah untuk menuju pendidikan yang berorientasi demokrasi dan kemanusiaan.

Fenomena kontradiktif, dimaknai sebuah gambaran kronologis kondisi dunia pendidikan kita saat ini. Artinya, ada kesenjangan, berlawanan, dan bertentangan antara konsep ideal dengan realitas praksis pendidikan atau antara dimensi fundasional dan operasional. Pendidikan yang ideal mempunyai tujuan yang mulia, penguatan pada aspek emosi, spritual, kepribadian, kesadaran diri, mandiri, dan kritis, tetapi justru pada kenyataannya menghasilkan manusia yang miskin dan kering akan nilai-nilai. Berbagai macam kasus kekerasan yang merebak dalam kehidupan kebangsaan dan kemasyarakatan kita, mengindikasikan bahwa pendidikan belum mempunyai peran signifikan dalam proses membangun kepribadian bangsa kita yang punya jiwa demokratis dan humanis. Kekerasan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga anak-anak yang masih dalam pengawasan sekolah, masyarakat, dan keluarga.

Seperti kasus yang dimuat dalam *Kompas.com*, tanggal 18 Februari 2012, “Banyaknya kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak akhir-akhir ini merupakan indikasi buruknya kesehatan mental masyarakat. Apabila tidak

ditangani serius, fenomena ini bisa berkembang menjadi gangguan antisosial, bahkan psikopat. Kondisi ini, menurut Nalini Muhdi, psikiater RSUD Dr Soetomo Surabaya, ketika dihubungi Kompas, tidak bisa dibiarkan.

Beberapa kasus kekerasan oleh anak terus terjadi. Kasus paling baru menimpa siswa SD Negeri Cinere 1, SM (12), yang ditemukan nyaris tewas di got Perumahan Bukit Cinere Indah, Cinere, Kota Depok, Jawa Barat, Jumat (17/2) pagi, dengan delapan luka tusuk di perut, tangan, dan betis. Anak pasangan tunanetra ini diduga ditusuk teman sekelasnya, Amn (13). Peristiwa itu dipicu oleh pencurian telepon seluler milik SM oleh Amn, Rabu lalu.

”Kekerasan dan kriminalitas oleh anak termasuk gangguan tingkah laku pada anak. Jika tidak tertangani bisa berkembang menjadi gangguan antisosial, bahkan psikopat,” kata Nalini. Gangguan tingkah laku semacam itu bisa terjadi karena anak-anak terbiasa melihat kekerasan, baik langsung maupun tidak langsung. Akibatnya, anak-anak menganggap kekerasan sebagai cara menyelesaikan masalah.

Banyak faktor yang memengaruhi timbulnya gangguan tingkah laku, mulai dari faktor biologis berupa kelainan pada kromosom hingga faktor psikososial. ”Harus ada observasi mendalam tentang masa kecilnya, keluarganya, lingkungan tempat tinggalnya, dan *proses belajarnya*. Juga perlu dilihat seperti apa perasaan dia (pelaku) saat melakukan kekerasan. Penusukan sampai berkali-kali, bahkan sampai tembus ke bagian tubuh lain, menunjukkan impulsivitas luar biasa,” ujar Nalini. Sayangnya, ungkap Nalini, buruknya kesehatan mental

masyarakat belum menjadi perhatian pemerintah. Akar permasalahan belum dibicarakan. Ini sudah lampu merah! Masyarakat harus ikut bertanggung jawab.

Seto Mulyadi, pemerhati anak, menilai, kekejaman Amn adalah pelampiasan karena ia sering mendapat kekerasan. Itu dimungkinkan karena Amn tidak tinggal bersama orangtua. Selain itu, kata Erita Nurhetali, Koordinator Psikologi Terapan Intervensi Sosial Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, lingkungan hidup tersangka, seperti *sekolah* dan tempat dia tinggal, juga sudah rusak. Terbukti kontrol sosial atas perilaku Amn tidak berjalan. "Dia dengan mudah mengabaikan sistem nilai yang seharusnya menjadi acuan. Tidak ada nilai agama dan sosial yang dipegangnya," tutur Erita.

Amn, ditangkap dan ditahan Kepolisian Resor Kota Depok. Dia ditangkap saat akan masuk rumah di Gang Buntu, Cinere. Ia menolak dibawa petugas dengan berkata, "Apa salah saya, Mengapa saya dibawa?" Penganiayaan itu dipicu oleh pencurian telepon seluler milik SM oleh Amn, Rabu. Amn menjual telepon itu di kawasan Meruyung, Limo. Uang hasil penjualan Rp 110.000 dibagi-bagi, Amn mendapat Rp 50.000, Gb (12) Rp 50.000, dan Kf (12) Rp 10.000. Kf menilai pembagian itu tidak adil dan mengadukan pencurian tersebut kepada korban. SM saat itu meminta Amn mengembalikan telepon seluler yang dicuri. Amn menolak karena uang penjualan sudah habis. Gb mengembalikan Rp 30.000 kepada SM. Jumat, pukul 06.30, saat berangkat sekolah, Amn menjemput SM dan berjalan ke arah Perumahan Bukit Cinere Indah di barat Kantor Polsek Limo. Saat keduanya di Jalan Puri Pesanggrahan I dan suasana sepi, Amn tiba-tiba menikam

SM berkali-kali. ”Sadis sekali. Tingkat kekejian seperti orang dewasa. Pelaku seperti ingin menghabisi korban,” kata Kepala Polsek Limo Komisaris Sukardi.

Amn mengaku menyiapkan penganiayaan dari rumah. Pelaku membawa pisau 30 sentimeter dari rumah untuk melukai korban. Pelaku dan korban adalah teman sekelas di kelas VI. Amn ialah siswa pindahan dari Lampung yang sejak enam bulan lalu tinggal bersama kakaknya yang bekerja sebagai petugas keamanan.²

Dalam kasus di atas, tergambar dengan jelas bahwa salah satu faktor terjadinya kasus tersebut adalah sekolah dan proses belajar, yang menunjukkan indikasi buruknya kesehatan mental masyarakat, yang juga menggambarkan buruknya wajah pendidikan kita.

Pendidikan bukan hanya berupa transfer ilmu (pengetahuan) dari satu orang ke orang lain, tapi juga mentransformasikan nilai-nilai ke dalam jiwa, kepribadian, dan struktur kesadaran manusia. Hasil cetak kepribadian manusia adalah hasil dari proses transformasi pengetahuan dan pendidikan yang dilakukan secara demokratis dan humanis. Tapi, selama ini kita hanya melihat pendidikan hanya sebagai momen *ritualisasi*. Makna baru yang dirasakan cenderung tidak begitu signifikan. Apalagi, menghasilkan insan-insan pendidikan yang memiliki karakter demokrasi dan humanis. Pendidikan kita sangat miskin dari sarat keilmuan yang meniscayakan jaminan atas perbaikan kondisi sosial yang ada. Pendidikan hanya menjadi barang dagangan yang dibeli oleh siapa saja yang

²LusiaKusAnna, [http://health.kompas.com/read/2012/02/18/07471437/Kekerasan Indikasi Buruknya Kesehatan Mental Masyarakat](http://health.kompas.com/read/2012/02/18/07471437/Kekerasan%20Indikasi%20Buruknya%20Kesehatan%20Mental%20Masyarakat)., diakses tanggal 18 Februari 2012.

sanggup memperolehnya. Akhirnya, pendidikan belum menjadi bagian utuh dan integral yang menyatu dalam pikiran masyarakat keseluruhan.

Hal ini nampak dalam kondisi iklim pendidikan bangsa kita. Akhirnya, kita semua terpaksa harus membayar mahal demi memperoleh pendidikan. Padahal, belum tentu kualitas yang dihasilkannya akan menjamin atas pembentukan kepribadian yang memiliki kesadaran atas demokrasi dan kemanusiaan. Sistem pendidikan nasional yang ada selama ini mengandung banyak kelemahan. Dari soal buruknya manajemen pendidikan sampai pada soal mengenai minimnya dana untuk pengembangan pendidikan.

Pendidikan mempunyai hubungan dialogis dengan konteks sosial yang melingkupinya. Sehingga, pendidikan harus kritis terhadap berbagai fenomena yang ada dengan menggunakan pola pembahasan yang bernuansa sosio-historis. Lebih lanjut, dimaknai bahwa pendidikan kritis yang disertai adanya kedudukan wilayah-wilayah pedagogis dalam bentuk universitas, sekolah negeri, museum, galeri seni, atau tempat-tempat lain, maka ia harus memiliki visi dengan tidak hanya berisi individu-individu yang adaptif terhadap dunia hubungan sosial yang menindas, tapi juga didedikasikan untuk mentransformasikan kondisi semacam itu. Artinya, pendidikan tidak berhenti pada bagaimana produk yang akan dihasilkannya untuk mencetak individu-individu yang hanya diam manakala mereka harus berhubungan dengan sistem sosial yang menindas. Harus ada kesadaran untuk melakukan pembebasan.

Guru dalam proses pendidikan adalah hanya menceritakan realitas-realitas, seolah-olah sesuatu tidak bergerak, statis, terpisah satu sama lain, dan

dapat diramalkan. Akhirnya guru cuma mengisi para murid dengan bahan-bahan yang dituturkan, padahal itu terlepas dari realitas dan terpisah dari totalitas. Pendidikan yang bercerita mengarahkan murid-murid untuk menghafal secara mekanis apa yang diceritakan kepadanya. Pendidikan menjadi kegiatan menabung, ibaratnya para murid adalah celengannya dan para guru adalah penabungnya. Dalam model pendidikan ini secara jelas kita bisa melihat bahwa pendidikan adalah alat kekuasaan guru yang dominatif dan angkuh. Tidak ada proses komunikasi timbal-balik dan tidak ada ruang demokratis untuk saling mengkritisi. Guru dan murid berada pada posisi yang tidak berimbang. dengan demikian pengetahuan seolah-olah adalah anugerah yang dihibahkan oleh mereka yang menganggap dirinya berpengetahuan kepada mereka yang dianggap tidak memiliki pengetahuan apa-apa, alias bodoh. Di sinilah terselip ideologi penindasan.

Pendidikan dan realitas sosial mengaitkan antara kurikulum dengan realitas sosial adalah strategi untuk menciptakan model pendidikan yang berorientasi demokratis dan humanis. Kurikulum sengaja dibentuk untuk membaca realitas sosial. Kurikulum adalah alat baca dan panduan strategis bagi peserta didik untuk meneropong dunia sekitarnya. Sehingga, manakala mereka sudah selesai dari bangku sekolah formal, dengan hasil didikan yang diperolehnya selama ini maka itu bisa difungsikan untuk membaca realitas sekitarnya.

Di sini cerdas tidak dimaknai sebagai bentuk penguatan kognitif saja, tapi juga penguatan pada aspek emosi, spritual, kepribadian, dan kesadaran diri si terdidik. Mau tidak mau, si terdidik harus punya kesadaran kritis dalam

meneropong atau menyoroti realitas yang dihadapinya. Obyek yang diamati akan sangat banyak, beragam, dan kompleks sekali. Sehingga, diperlukan perangkat analisis yang amat jitu dan tepat sasaran. Kemungkinan karakter pendidikan semacam ini perlu dibarengi dengan pengkondisian atas situasi proses belajar-mengajar yang elegan, egaliter, demokratis, dan humanis.

Kesalahan-kesalahan dalam paradigma berfikir pendidikan umum maupun pendidikan agama telah di ulas oleh cukup banyak pakar. Ben Brodinasky misalnya, menyatakan bahwa campur tangan negara dalam hal pendidikan akhirnya hanya akan menundukkan sekolah dibawah satu “dewan super” yang dikontrol oleh negara. Sekolah, terutama sekolah negeri telah bergerak menuju ke arah penciptaan sebuah generasi medikritas minimal. Artinya, dengan menekankan keterampilan komunikasi dan hitung menghitung, mengabaikan ilmu-ilmu baru dan kreatifitas, menggerogoti sifat belajar yang memanusiaikan, dan meletakkan pendidikan di bawah sifat paksaan dan otokrasi, maka pendidikan akan kehilangan kekuatan semula yang selama ini telah menjaga agar bangsa ini tetap bebas, inventif serta produktif.³

Hal ini mirip dengan apa yang diungkapkan John Dewey, bahwa sekolah masih melihat anak sebagai “barang mati” sebagaimana layaknya buku teks, kurikulum dan sejenisnya, sekolah gagal melihat anak sebagai makhluk hidup yang tumbuh dalam pengalaman dan berinteraksi dengan lingkungannya.⁴

³Ben brodinsky, *Kembali ke Dasar, Gerakan dan Maknanya*, dalam Omi Intan Naomi (ed) *Menggugat Pendidikan, Fundamentalis, Konservatif, Liberal dan Anarkis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), Cet.IV, hlm. 56-57.

⁴ John Dewey, *Democracy and education*, (London: Selected Educational Writing, 1961), hlm. 17.

Manusia menurut pandangan Ki Hadjar Dewantara dijelaskan dalam tulisannya yang berjudul “*Keindahan Manusia*” yaitu, “Manusia adalah makhluk yang berbudi, sedangkan budi artinya jiwa yang telah melalui batas kecerdasan yang tertentu, hingga menunjukkan perbedaan yang tegas dengan jiwa yang dimiliki hewan. Jika hewan hanya berisikan nafsu-nafsu kodrati, dorongan dan keinginan, insting dan kekuatan lain yang semuanya itu tidak cukup berkuasa untuk menentang kekuatan-kekuatan, baik yang datang dari luar atau dari dalam jiwanya. Jiwa hewan semata-mata sanggup untuk melakukan tindakan-tindakan yang perlu untuk memelihara kebutuhan-kebutuhan hidupnya yang masih sangat sederhana, misalnya makan, minum, bersuara, lari dan sebagainya.”⁵

Ia melihat manusia lebih pada sisi kehidupan psikologinya. Menurutnya manusia memiliki daya jiwa yaitu cipta, karsa dan karya. Pengembangan manusia seutuhnya menuntut pengembangan semua daya secara seimbang. Pengembangan yang terlalu menitikberatkan pada satu daya saja akan menghasilkan ketidakutuhan perkembangan sebagai manusia. Beliau mengatakan bahwa pendidikan yang menekankan pada aspek intelektual belaka hanya akan menjauhkan peserta didik dari masyarakatnya. Dan ternyata pendidikan sampai sekarang ini hanya menekankan pada daya cipta, dan kurang memperhatikan pengembangan olah rasa dan karsa. Jika berlanjut terus akan menjadikan manusia kurang humanis atau manusiawi.⁶

⁵ Ki Hadjar Dewantara, *Menuju Manusia Merdeka*, (Yogyakarta: Leutika, 2009), hlm. 53-86.

⁶ Zaim Elmubarok. *Membumikan Pendidikan Nilai, Mengumpulkan yang Terserak, Menyambung yang Terputus, dan Menyatukan yang Tercerai*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 26.

Dari penjelasan di atas tentang kedudukan hidup manusia terangnya, bahwa substansi dan pokoknya tidak lain daripada dua pangkal sifat tadi, yaitu keluhuran dan kehalusan. Dan inilah yang disebut perikemanusiaan seperti menjadi satu dari dasar pancasila ataupun juga bisa dianggap yang paling mendasar dan paling dalam.

Demokratisasi pendidikan yang menjadi salah satu gagasan kunci dalam wacana pendidikan kritis dapat dikatakan merupakan salah satu prasyarat penting bagi pertumbuhan sistem politik demokrasi. Perubahan Indonesia menuju demokrasi kelihatan tidak bisa dielakkan, liberalisasi dan demokratisasi itu hanyalah mengikuti kecendrungan pertumbuhan dramatis demokrasi pada tingkat internasional. Indonesia pada akhirnya apa yang disebut banyak ahli sebagai *third wave of democracy*. Menurut berbagai kajian, jumlah negara yang secara formal menganut demokratis meningkat drastis pada dasawarsa 1990-an; jumlah meningkat dari 76 negara (46,1 persen) dari jumlah seluruh negara di dunia menjadi 117 (63,1 persen).⁷

Pendidikan Islam sesungguhnya memiliki sebuah potensi besar dalam pemberdayaan pendidikan rakyat secara keseluruhan dengan kedekatannya kepada masyarakat Muslim, pendidikan Islam merupakan potensi dalam pembentukan civil society, masyarakat madani, atau masyarakat kewargaan pada tingkat akar rumput kaum Muslimin.⁸

⁷ Azyumardi Azra, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional, Rekonstruksi dan Demokratisasi* (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2002), hlm. 151-152.

⁸ Azyumardi Azra, tentang *Demokrasi Pendidikan Islam*, dalam Presentasi Makalah Yeni Oktarina, Program Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia, 2009.

Selanjutnya, dalam konteks interaksi guru dan murid, tentunya sosok kepribadian guru menjadi komponen yang signifikan dalam mewarnai kepribadian anak didik. Menurut Zakiah Daradjat,⁹ seorang guru harus memiliki kepribadian yang baik yaitu kepribadian yang terpadu sehingga dapat menghadapi berbagai masalah dengan wajar, tenang dan kokoh, dengan pribadi yang demikian ia dapat melihat masalah secara wajar, sehat dan objektif, pikirannya mampu bekerja dengan tenang menghadapi pertanyaan siswa dengan objektif, memiliki perasaan dan emosi yang stabil, perilaku sehari-hari yang layak, menjadi teladan bagi siswanya, bersikap adil terhadap semua siswa serta memiliki apresiasi yang tinggi terhadap ajaran agama yang dibuktikan dengan pengalamannya dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan penekanan kepada kepribadian guru yang mampu berbuat adil dan memiliki perasaan dan emosi yang stabil, mampu memperlakukan peserta didik yang memiliki kebebasan dan potensi berbeda-beda menurut fitrahnya masing-masing maka, sikap tersebut nampak terkandung substansi nilai-nilai demokrasi dan humanis pada kepribadian seorang guru.

Dalam konteks ini, pandangan-pandangan tentang kebebasan manusia, merupakan juga tema-tema yang akan kita temukan pada wacana keislaman, baik klasik sampai modern. Pada era klasik, perdebatan teologis selalu berakar pada konsep kebebasan manusia dalam berkehendak dan intervensi Tuhan di dalamnya, semisal Mu'tazilah,¹⁰ Asyariyah¹¹ ataupun Maturidiyah.¹²

⁹ Zakiah Darajat, *Kepribadian Guru*, Jakarta: Bulan Bintang, 1982), hlm. 12-24.

¹⁰ Mu'tazilah dikenal dengan *ahl al-adl' wa al-Tauhid*. Dan juga disebut kelompok qadariyah atau 'adliyah, secara garis besar golongan ini berpendapat bahwa manusia berkuasa atas

Tema-tema kebebasan manusia selanjutnya terus diadopsi oleh pemikir-pemikir Islam di era modern, yang kemudian menghasilkan wacana “kiri Islam”¹³ yang secara substantif, menghendaki dikembalikannya kebebasan manusia dan diakhirinya penjajahan dan dominasi, baik secara esensial maupun struktural terhadap manusia. Secara historis, ide-ide tentang “perang” terhadap keadilan sosial, sebenarnya adalah tujuan utama mengapa agama Islam “dihadirkan”.

Nabi Muhammad Saw. sebagai simbolik terbesar Islam, adalah seorang revolusioner Arab yang gigih menentang penindasan. Islam yang dibawa Muhammad lahir di milieu perdagangan Mekkah, di mana Nabi harus berhadapan dengan masyarakat yang digerogeti oleh dispratis sosial dan ekonomi yang kuat, kebusukan moral dan kebobrokan agama.

perbuatannya sendiri. Karena itu manusia berhak memperoleh pahala atas perbuatan baik dan harus menerima siksa atas perbuatan jahatnya. Diantara tokoh Mu,tazilah adalah Washil bin ‘atha, Lihat : Asy-Syahrastani, *Al Milal wa Al Nihal*, diterjemahkan oleh Prof. Asywadie Syukur,Lc. (Surabaya: PT.Bina Ilmu,tt), hlm.37.

¹¹ Aliran ini datang belakangan dari Mu’tazilah dan mengambil nama pendirinya Abu al-Hasan al-Asyari (260-324 H) ia dibesarkan dilingkungan Mu,tazilah sejak kecil sampai usa 40 tahun, ketika ia mendirikan aliran ini. Aliran ini disebut sebagai aliran tengah antara *ahl al-hadis* yang sangat literer dan golongan Mu’tazilah yang sangat rasionalis, Lihat : Ibrahim Madkur, *Fi al-Falsafat al Islamiyyat*, (Kairo: Dar al-Ma’arif, 1976), hlm. 113-114.

Salah satu perbedaan dokrin yang mendasar antara Mu’tazilah dan Asy’ariah adalah tentang perbuatan manusia dan kemampuan akal, Mu,tazilah meletakkan kemampuan yang tinggi kepada akal dan memandang manusia mempunyai efektifitas dalam perwujudan perbuatannya, sedangkan Asy’ariah kurang memberi kemampuan pada akal dan tidak memberi efektifitas pada manusia. Lihat: Harun Nasution, *Teologi Islam*, (Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia,1972), hlm. 86-87,107.

¹²Aliran ini mengambil nama pendirinya, Abu Manshur al-Maturidi. Dilihat dari segi pandangannya tentang kemampuan akal dan perbuatan manusia. Aliran ini lebih maju dari Asy’ariyah, namun tidak sampai kepada Mu’tazilah. Harun, *Teologi*, hlm. 92.

¹³ Istilah kiri Islam pertama kali diperkenalkan oleh Hasan Hanafi, yang menurut Kazuo Shimogaki, bertugas untuk mengkaji elemen-elemen revolusioner dalam agama dan dipopulerkan lewat jurnal Al-Yasar al-Islami: *Kitabat Fi an-Nahdhah al-Islamiyah (Kiri Islam: Beberapa Esai Tentang Kebangkitan Islam)*, dan para pemikir yang segaris dengan semangat Hasan, semisal Ziaul Haque, Asghar Ali ataupun Ali Syari’ati. Lebih lanjut, lihat: Kazuo Shimogaki, *Kiri Islam: Telah Kritis Pemikiran Hasan Hanafi*, (Yogyakarta: LKIS, 2004).

Kekerasan adalah hukum dimana suku-suku yang kuat menaklukkan dan memperbudak yang lemah, tidak seorangpun aman diluar daerah-daerah terlarang *ka'bah*, *haram*, daerah suci, dimana permusuhan dan pertumpahan darah sebenarnya dilarang. Anak-anak yatim yang kelaparan, janda-janda, para budak, dan orang-orang buangan berkumpul dikota-kota seperti Mekkah dan dieksploitasi oleh lintah darat kaya, bangsawan dan pedagang. Ketakutan masyarakat Arab dalam menghadapi Muhammad sebenarnya bukanlah pertentangan mereka terhadap agama Tauhid, namun ketakutan akan runtuhnya tatanan hegemoni yang selama ini mereka nikmati.

Ziaul Haque menyatakan bahwa nabi-nabi dalam Islam adalah revolusioner sosial. Mereka diberikan amanah menegakkan kebenaran dan dengan tegas menghadapi kejahatan dan kepalsuan, mereka memberontak terhadap tatanan sosial yang tiran dan menindas, yang memecah belah masyarakat mereka ke dalam kelas-kelas majikan dan budak, penindas dan tertindas, mereka mengorganisir komunitas-komunitas baru yang berdasarkan kebenaran, kesetaraan dan persaudaraan.¹⁴

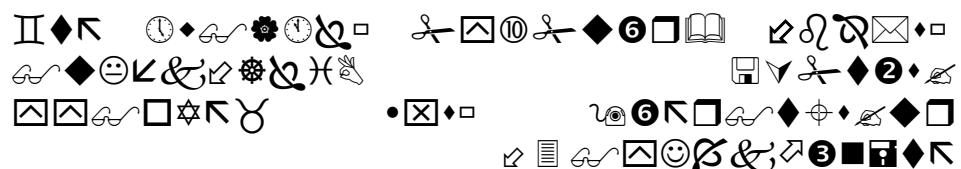
Menurut Ali Syari'ati, kesadaran diri, kemauan bebas dan kreatifitas adalah tiga hal yang membedakan manusia dengan binatang, dalam dimensinya sebagai *insan* bukan sebagai *basyar*. Jika sebagai *basyar* manusia terikat pada determinisme struktur fisiologis dan realitas empiris yang mengitarinya, maka sebagai *insan*, manusia dengan kesadaran diri, kemauan bebas dan kreatifitasnya

¹⁴ Ziaul Haque, *Wahyu dan Revolusi*, (Yogyakarta: LKIS, 2000), hlm.110.

dapat melakukan “pengembaraan” dalam membangun kebudayaan dan peradaban.¹⁵

Nilai demokrasi dan humanis sesungguhnya juga dapat digali dari sumber al-Qur’an dan Hadis. Sebagaimana kita yakini bahwa al-Qur’an merupakan wahyu yang diturunkan Allah Swt untuk pedoman hidup manusia sebagai sumber utama dan pertama dalam Islam. Dalam al-Qur’an terdapat banyak ajaran yang berbicara tentang manusia dan nilai keberadaannya, mulai dari siapa itu manusia, apa kedudukannya dan tugasnya, hingga ajaran yang menuntun manusia bagaimana ia bertingkah-laku dan bertindak dalam menjalankan kehidupannya. Sebagai contoh ketika al-Qur’an menjelaskan tentang syura’ (musyawarah) yang dipahami bahwa syura’ (musyawarah) adalah salah satu interpretasi dari praktik demokrasi. Ada tiga ayat al-Qur’an yang akar katanya menunjukkan musyawarah:

1. Dalam al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 233



أُولُو الْأَرْحَامِ

“Apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya.”

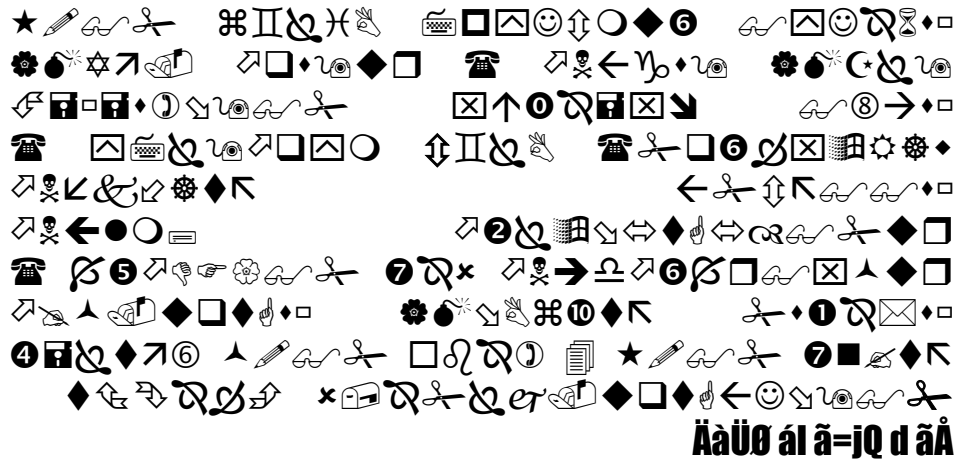
Q.S. Al-Baqarah ayat 233.

Ayat ini membicarakan bagaimana seharusnya hubungan suami istri saat mengambil keputusan yang berkaitan dengan rumah tangga dan anak-anak, seperti

¹⁵Ali Syari’ati, *Man and Islam*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2000), hlm.120-121.

menyapuh anak. Pada ayat diatas al-Qur'an memberi petunjuk agar persoalan itu dan juga persoalan-persoalan rumah tangga lainnya dimusyawarahkan antara suami istri.

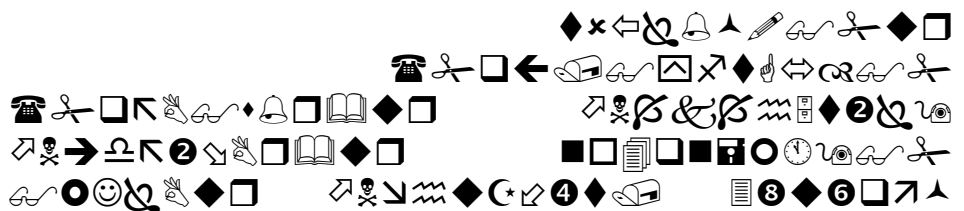
2. Dalam surat Ali 'Imron ayat 159



“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”. Q.S. Ali ‘Imron ayat 159.

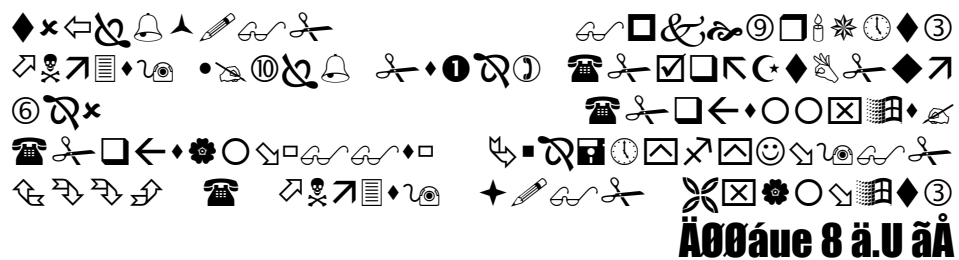
Ayat ini dari segi redaksional ditujukan kepada Nabi Muhammad Saw, agar memusyawarahkan persoalan-persoalan tertentu dengan sahabat atau anggota masyarakatnya.

3. Dalam surat Al-Syura' ayat 38



hak kepada individu-individu untuk menegaskan apa saja yang disukai selama tidak menimbulkan kerusakan.

Pada konteks tentang nilai humanis, maka paparan Quraish Shihab berikut ini menunjukkan suatu relevansi dan interpretasi yang mendalam dari nilai humanis yang terdapat dalam al-Qur'an, bahwa "masyarakat atau mereka yang berkemampuan harus membantu menciptakan lapangan pekerjaan untuk setiap anggotanya yang berpotensi. Karena itulah monopoli dilarng-Nya. Jangankan di dalam bidang ekonomi, pada tempat duduk pun diperintahkan agar memberi peluang dan kelapangan".



"Hai orang-orang beriman apabila dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu." Q.S. Al-Mujadilah ayat 11.

Setiap insan harus memperoleh perlindungan jiwa, harta dan kehormatannya. Janganlah membunuh atau merampas harta secara tidak sah, mengancam atau mengejek dengan sindiran halus, atau menggelari dengan sebutan yang tidak senonoh, berprasangka buruk tanpa dasar, mencari-cari kesalahan, dan sebagainya. Kesemuanya ini terlarang dengan tegas, karena semua itu dapat menimbulkan rasa takut, tidak aman, maupun kecemasan yang

mengantarkan kepada tidak terciptanya kesejahteraan lahir dan batin yang didambakan. Q.S. Al-Hujarat ayat 11-12.¹⁷

Al-Ghazali termasuk kedalam kelompok sufistik yang banyak menaruh perhatian yang besar terhadap pendidikan, karena pendidikanlah yang banyak menentukan corak kehidupan suatu bangsa dan pemikirannya. Dalam masalah pendidikan, al-Ghazali lebih cenderung berfaham empirisme. Hal ini disebabkan karena ia sangat menekankan pengaruh pendidikan terhadap anak didik. Menurutnya seorang anak tergantung kepada orang tua yang mendidiknya. Hati seorang anak itu bersih, murni laksana permata yang berharga, sederhana dan bersih dari gambaran apapun.¹⁸

Pada aspek murid sebagai subjek pendidikan, konsep al-Ghazali banyak berhubungan dengan persoalan sikap kritis dan selektif murid pada ilmu dan guru. Pada sisi lain, murid bukanlah anak didik yang bebas disugahi sekumpulan ilmu atau kurikulum tertentu secara sepihak. Dalam perspektif al-Ghazali, murid adalah anak didik yang memiliki kemandirian untuk memutuskan ilmu apa yang harus dipelajari sesuai kriteria yang ia gunakan. Sikap kritis dan selektif murid pada ilmu berkaitan dengan hirarki ilmu (apa objek ilmu yang paling penting dipelajari), aspek epistemologi ilmu (ilmu apa yang memiliki kredibilitas dan validitas teoritik), aspek aksiologi ilmu (ilmu apa yang paling bermanfaat), visi ilmu (ilmu apa yang memiliki tujuan dunia dan akhirat sekaligus), tingkat steril

¹⁷ M.Quraish Shihab, *Wawasan, Ibid*, hlm. 132.

¹⁸ Jalaluddin & Usman Said, *Filsafat Pendidikan Islam, Konsep dan Perkembangan Pemikiran*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994), hlm. 139.

ilmu (ilmu apa yang tidak berbahaya dipelajari dan ilmu apa yang bebas polemik atau bebas kontroversi), dan visi belajar (untuk apa ilmu dipelajari).¹⁹

Dengan demikian dapat dipahami bahwa, ilmu yang dipelajari murid adalah ilmu yang dinilai kredibel dan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan murid sendiri. Murid diberikan ruang untuk bersikap kritis, selektif, dan mandiri terhadap ilmu maupun guru. Perlakuan terhadap murid yang demikian tentunya memberikan gambaran sebuah konsep yang demokratis dan humanis.

Salah satu komponen yang turut menentukan berhasil tidaknya sebuah proses pembelajaran adalah pendalaman terhadap latarbelakang anak didik. Menurut al-Mawardi, untuk bisa mengenal latar belakang dan perbedaan individual murid, guru harus memiliki *firasah*²⁰. Dalam konteks ini al-Mawardi menekankan hendaknya dalam proses pembelajaran, seorang guru memperhatikan pada aspek psikologis anak, yang memiliki perbedaan tingkat kemampuan dan kecerdasan. Dengan kata lain dalam proses pendidikan hendaknya anak mendapatkan perlakuan penuh keadilan dan manusiawi sesuai dengan kebutuhannya.

Selanjutnya, Ibn Khaldun berpendapat bahwa pendidikan berusaha untuk melahirkan masyarakat yang berkebudayaan dan bekerja untuk melestarikan eksistensi masyarakat selanjutnya, maka pendidikan akan mengarahkan kepada pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Rumusan pendidikan yang

¹⁹ Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali, *Ihya' 'Ulum ad- Din*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), Juz 1, hlm. 49-55.

²⁰*firasah*:(kemampuan mengidentifikasi aspek batin dengan melihat aspek lahirnya), yaitu kemampuan mengidentifikasi sejumlah indikator untuk mengenal tingkat kemampuan murid dan tingkat kesulitan materi yang sesuai dengan kecerdasan murid. Abu Hasan 'Ali ibn Muhammad ibn Habib al-Mawardi, *Adab al-Dunya wal al-Din*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 87.

dikemukakan oleh Ibn Khaldun adalah merupakan hasil dari berbagai pengalaman yang dilaluinya sebagai seorang ahli filsafat sejarah dan sosiologi yang mencoba menghubungkan antara konsep dan realita. Sebagai seorang ahli filsafat sejarah, tentu ia menggunakan pendekatan filsafat sejarah atau *historical philosophy approach*, karena kedua pendekatan tersebut akan mempengaruhi terhadap system berfikir dan pemikirannya dalam pembahasan setiap permasalahan, karena kedua pendekatan tersebut mampu merumuskan beberapa pendapat dan interpretasi dari suatu kenyataan dan pengalaman yang telah dilalui.²¹

Dari rumusan pendidikan menurut Ibn Khaldun tersebut, nampak sebuah penekanan bahwa hendaknya bobot sebuah pendidikan memiliki keselarasan antara teori dan praktik, sebab bila hal tersebut gagal diwujudkan maka dapat dipastikan menimbulkan sebuah produk pendidikan yang tidak seimbang, sarat kesenjangan, kering nilai-nilai, dan tidak menyeluruh, sebagaimana salah satu masalah realitas kondisi pendidikan yang dihadapi bangsa kita saat ini.

Hanya dengan keterbukaan dan moderasi (*tawassuth*) maka kita akan bisa melihat realitas secara obyektif. Pemahaman demikian adalah tugas penting pendidikan. Bagaimana pendidikan itu mampu membangun kepribadian manusia yang berkarakter terbuka, manusiawi, dan memiliki kesadaran yang tinggi ketika harus menghadapi realitas yang diliputi bermacam-macam persoalan pelik. Juga, hanya dengan kedewasaan yang tinggi, manusia terdidik akan mampu menghadapi persoalan yang tengah dihadapinya. Sesulit apapun, segala masalah tentunya ada solusinya dan akan terselesaikan dengan baik. Pendidikan yang

²¹ Abdul Kholiq Dkk, *Pemikiran Pendidikan Islam Kajian Tokoh Klasik & Kontemporer*, (Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 6-7.

mengajarkan anti-kekerasan, yang berwajahkan demokratis dan humanis adalah cita-cita dan harapan kita semua. Kita sangat berharap mudah-mudahan para pengambil kebijakan pendidikan di negeri ini mau dan sudi memikirkan hakikat pendidikan yang diterapkan dalam kurikulum di berbagai lembaga pendidikan. Dan perlu disisipkan gagasan dalam membuat suatu kebijakan, bahwa pendidikan hendaknya jauh dari praktik kapitalisasi.

Pendidikan merupakan wilayah kultural yang tidak bisa dipolitisasi dan dikapitalisasi. Pendidikan yang demokratis dan humanis akankah hanya retorika atau justru akan terwujud menjadi kenyataan dalam dunia pendidikan kita. Mudah-mudahan yang terbaiklah yang akan kita dapatkan nanti di kemudian hari. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dibutuhkan desain dan format pendidikan yang tepat. Di ranah ini, pendidikan Islam berpeluang besar untuk mewujudkannya, khususnya pendidikan Islam yang berwawasan demokratis dan humanis. Sebab pendidikan Islam mempunyai tujuan untuk membentuk manusia ideal, manusia sempurna (*insan kamil*), manusia yang sadar akan fungsinya sebagai penegak keadilan, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, sebagai hamba Tuhan dan khalifah di muka bumi.

Dengan berdasarkan paparan latar belakang di atas maka perlu untuk mengetahui dan mendalami bagaimana "*Pendidikan Demokrasi dan Humanis dalam Pendidikan Islam*".

A. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka fokus masalah dalam penelitian tesis ini adalah:

1. Bagaimana deskripsi tentang pendidikan demokratis.
2. Bagaimana deskripsi tentang pendidikan humanistik.
3. Bagaimana deskripsi tentang paradigma pendidikan Islam.
4. Bagaimana implementasi pendidikan demokratis dan humanistik dalam pendidikan Islam.

B. Definisi Istilah

1. Demokrasi

Demokrasi merupakan kata yang mempunyai konotasi istilah khas, yang sengaja dipergunakan oleh pencetusnya untuk menyebut sistem pemerintahan tertentu yang dibangun berdasarkan asas rakyat sebagai sumber kekuasaan. Istilah ini pertama kali digunakan oleh Herodot yang lahir pada abad 5 M. Ketika itu ia menggunakan kata *democratia* dalam bentuk pemerintahan hasil pembaruan yang dikemukakan oleh Kleistenes.²²

Secara etimologis istilah *demokrasi* berasal dari dua kata, yaitu *demos* yang bearti rakyat dan *kratos* atau *cratein* yang bearti pemerintahan (*rule*) atau

²² H.A.R. Tilaar, *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm. 26.

kekuasaan (*strength*).²³ Dalam *Kamus Bahasa Indonesia*, istilah *demokrasi* diartikan sebagai bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakil-wakilnya (pemerintahan rakyat); *demokrasi* dimaknai pula sebagai sebuah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.²⁴

Demokratisasi dalam konteks pendidikan dapat diartikan sebagai pembebasan pendidikan dan manusia dari struktur dan sistem perundangan yang menempatkan manusia sebagai komponen. Menurut *Hujair Sanaky*, demokratisasi pendidikan merupakan pendidikan hati nurani. Artinya, pendidikan yang lebih menghargai potensi manusia, lebih humanis, beradab, dan sesuai dengan cita-cita masyarakat madani. Melalui demokratisasi pendidikan, diharapkan akan terjadi proses kesetaraan antara pendidik dan peserta didik di dalam proses belajar mengajar.²⁵

2. Humanis

Konon akar dari kata *humanisme* adalah kata latin *humus* yang berarti tanah atau bumi. Dari situ muncul istilah *homo* yang berarti “makhluk bumi” dan *humanus* yang menunjuk kata sifat “membumi” dan “manusiawi”. Namun dalam

²³ Sunil Bastian dan Robin Lucham (ed), *Can Democracy be Desigend ? The Polity of Institutional choice in Conflict-torn Societies*, (London & Newyork: Zed Book, 2003), hlm. 15.

²⁴ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 337.

²⁵ Haryanto Al-Fandi, *Desain Pembelajaran yang Demokratis dan Humanis*, (Jogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm.167.

literatur Latin klasik *humanus* mendapat pelbagai konotasi lebih besar yakni “karakter khas manusia”, “murah hati”, dan “terpelajar”.²⁶

Humanisme adalah istilah dalam sejarah intelektual yang acapkali digunakan dalam bidang filsafat, pendidikan, dan literatur. Kenyataan ini menunjukkan beragam makna yang terkandung dalam dan diberikan kepada istilah ini. Meskipun demikian, secara umum kata humanisme ini berkenaan dengan pergumulan manusia dalam memahami dan memaknai eksistensi dirinya dalam hubungan dengan kemanusiaan orang lain di dalam komunitas. Perbedaan interpretasi atas kata humanisme sebetulnya lebih merupakan persoalan pespektip dalam menelaah bidang yang dikaji. Artinya, makna kata tersebut amatlah tergantung pada untuk maksud apa orang membicarakannya atau untuk kepentingan rencana dan proyek kemanusiaan apa orang mendiskusikan dan mengartikannya.²⁷ Meskipun memiliki perbedaan dalam interpretasi, tetapi dalam konsentrasi terhadap nilai-nilai kemanusiaan, memiliki kesamaan yang mengandung unsur, antara lain adalah:

- a. Humanis, yaitu orang yang mendambakan dan memperjuangkan terwujudnya pergaulan hidup yang lebih baik, berdasarkan asas perikemanusiaan; pengabdian kepentingan sesama umat manusia; penganut paham yang menganggap manusia sebagai objek terpenting.
- b. Humanum, yaitu gambaran manusia dalam hakikat dan kedudukannya di dunia.

²⁶ Lihat Vito R. Giustiniani, *Homo Humanus, and the Meanings of Humanism*, Journal of the history of ideas, 1985, hlm. 167.

²⁷ Bambang Sugiharto, *Humanisme dan Humaniora, Relevansinya Bagi Pendidikan*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2008), hlm.1.

- c. Humanitas, yaitu hubungan baik dan harmonis antara seseorang dengan manusia lain yang ditandai oleh kehalusan budi pekerti dan adab, pengertian, apresiasi, simpati, kebersamaan, dan sebagainya.
- d. Humaniora, yaitu sarana pendidikan untuk mencapai humanitas berupa ilmu pengetahuan budaya warisan berbagai bangsa, termasuk warisan budaya bangsanya sendiri.
- e. humanistik adalah rasa kemanusiaan atau yang berhubungan dengan kemansuaian.

3. Pendidikan Islam

Dalam rangka merumuskan pendidikan Islam yang lebih spesipik lagi, para tokoh pendidikan Islam kemudian memberikan kontribusinya, diantaranya Zakiah Daradjat yang mendefinisikan pendidikan Islam sebagai usaha dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyampaikan seruan agama dengan berdakwah, menyampaikan ajaran, memberi contoh, melatih keterampilan berbuat, memberi motivasi dan menciptakan lingkungan sosial yang mendukung pelaksanaan ide pembentukan pribadi Muslim.²⁸ Selanjutnya, menurut Sayid Sabiq, pendidikan Islam adalah suatu aktivitas yang mempunyai tujuan mempersiapkan anak didik dari segi jasmani, akal dan ruhaninya sehingga nantinya mereka menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat, baik bagi dirinya maupun umatnya (masyarakatnya).²⁹ Sedangkan, Omar Muhammad al-Toumy as-

²⁸ Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), hlm. 27.

²⁹ Sayyid Sabiq, *Islamuna*, (Beirut: Darul Kitab, tt), hlm. 237

Syaibany, mendefinisikan pendidikan Islam sebagai proses merubah tingkah laku yang terjadi pada diri individu maupun masyarakat.³⁰

Dengan pemahaman dari beberapa paparan di atas, maka yang dimaksudkan dari istilah pendidikan demokrasi, pendidikan humanis, dan pendidikan Islam tersebut adalah konsep pendidikan yang bersifat relegius, demokratis, dan humanis, yang lebih memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya secara optimal, lebih menekankan pada transformasi nilai-nilai, dan lebih berorientasi pada proses daripada hasil. Adapun, dalam desain pembelajaran komponen (afektif, kognitiv, dan psikomotorik) pembelajaran dilakukan secara seimbang dan integral, kemudian diformulasikan kedalam sebuah bentuk konsep format pendidikan yang ideal.

C. Tujuan Kajian

Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk memberikan deskripsi tentang pendidikan demokratis dan humanis dalam pendidikan Islam dan secara khusus tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan deskripsi analitis tentang pendidikan demokratis.
2. Untuk mendapatkan deskripsi analitis tentang pendidikan humanistik.
3. Untuk mendapatkan deskripsi analitis tentang paradigma pendidikan Islam.
4. Untuk mendapatkan deskripsi analitis implementasi pendidikan demokratis dan humanistik dalam pendidikan Islam.

³⁰ Omar Muhammad al-Toumy as-Syaibany, *Falsafah Pendidikan Islam*, Terj. Hasan Langgulung, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hlm. 134.

D. Kegunaan Kajian

1. Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan atau perspektif baru dalam bidang pendidikan Islam yang terkait dengan masalah pendidikan demokrasi dan humanis dalam pendidikan Islam.

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan bagi para guru khususnya bagi guru pendidikan agama Islam yang akan memotivasi kearah peningkatan profesionalisme dan moralitas guru dalam melaksanakan tugas edukatif dan berguna juga bagi siswa dalam meningkatkan karakter dan prestasi akademik.

E. Metode Kajian

1. Metode

Metode adalah prosedur atau cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah merujuk pada metode yang dikembangkan oleh Jujun Suriasumantri³¹ yaitu *deskriptif analitis*. Menurut *Suriasumantri*, metode ini merupakan pengembangan dari metode deskriptif atau yang dikenal dengan sebutan *deskriptif analitis*, yang

³¹Jujun S. Sumantri. *Penelitian Ilmiah, Kefilsafatan dan Keagamaan: Mencari Paradigma Bersama dalam Tradisi Baru Penelitian Agama Islam: Tinjauan antar Disiplin Ilmu*, (Bandung: Nuansa bekerjasama dengan Pusjarlit Press,1998), hlm. 41-61.

mendeskripsikan gagasan manusia tanpa suatu analisis yang bersifat kritis. Menurut Suriasumantri, metode ini kurang menonjolkan aspek kritis yang justru sangat penting dalam mengembangkan sintesis. Karena itu, menurut Suriasumantri, seharusnya yang lengkap adalah metode *deskriptis analisis kritis* atau disingkat menjadi *analitis kritis*. Metode analitis kritis bertujuan untuk mengkaji gagasan primer mengenai suatu “ruang lingkup permasalahan” yang diperkaya oleh gagasan sekunder yang relevan. Adapun fokus penulisan *analitis kritis* adalah mendeskripsikan, membahas dan mengkritik gagasan primer yang selanjutnya “dikonfrontasikan” dengan gagasan primer yang lain dalam upaya melakukan studi berupa perbandingan, hubungan dan pengembangan model.

2. Sumber Data

Sumber data yang dibutuhkan adalah sumber data *primer* dan sumber data *sekunder*.³² Sesuai dengan metode yang digunakan dalam penulisan ini, maka penulis akan mengambil dan menyusun data yang berasal dari beberapa konsep pendidikan demokrasi dan humanistik, baik yang berbentuk buku-buku, majalah, jurnal, koran, maupun artikel yang ada, merupakan sumber data utama atau primer. Sedangkan data sekunder sebagai penunjang dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, koran atau yang lainnya yang berkaitan dengan konsep pendidikan demokrasi dan humanistik. Adapun diantara data primer yang dimaksud adalah:

01. Paulo Freire, Pendidikan Sebagai Praktik Pembebasan, Jakarta: Gramedia, 1984.
02. Paulo Freire, Politik Pendidikan: Kebudayaan, Kekuasaan, dan Pembebasan,

³² Lexy J. Moleong, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2002), hlm. 164.

Yogyakarta: Read dan Pustaka Pelajar, 2002.

03. Paulo Freire, Ivan Illich, Erich Fromm, dkk. *Menggugat Pendidikan, Fundamentalisme, Konservatif, Liberal, Anarkis*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2009.
04. Ki Hadjar Dewantara, *Menuju Manusia Merdeka*, Yogyakarta: Leutika, 2009.
05. Ki Hadjar Dewantara, *Pendidikan, Bagian Pertama*, Yogyakarta, Percetakan Taman Siswa, 1962.
06. Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999.
07. Masykuri Abdillah, *Negara Ideal menurut Islam dan Implementasinya pada Masa Kini, dalam Islam, Negara dan Civil Society*, Jakarta: Paramida, 2005.
- Abudin Nata, *Manajemen Pendidikan; Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010

3. Teknik Pengumpulan Data

Sebelum penulis menjelaskan teknik pengumpulan data dari penulisan ini, perlu diketahui bahwa penulisan ini bersifat kepustakaan (*Library Reaseach*). Karena bersifat *Library Research* maka dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik *dokumentasi*, artinya data dikumpulkan dari dokumen-dokumen, baik yang berbentuk buku, jurnal, majalah, artikel maupun karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan judul yang diangkat oleh penulis, yakni tentang pendidikan demokratis dan humanis dalam pendidikan Islam.

4. Tehnik Analisis Data

Analisa data merupakan tahap terpenting dari sebuah penulisan. Sebab pada tahap ini dapat dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah penyampaian yang benar-benar dapat digunakan untuk

menjawab persoalan-persoalan yang telah dirumuskan. Secara definitif, analisa data merupakan proses pengorganisasian dan pengurutan data ke dalam pola kategori dan suatu uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang dirumuskan oleh data.³³

Adapun tehnik analisa dari penulisan ini adalah *deskriptif analitis* yakni pengolahan data dengan cara pemilahan tersendiri berkaitan dengan pembahasan dari beberapa literatur yang kemudian dideskripsikan, dicari relevansinya, dan dibahas. Selanjutnya dikategorisasikan (dikelompokan) dengan data yang sejenis, dan dianalisa isinya secara kritis guna mendapatkan formulasi yang kongkrit dan memadai, sehingga pada akhirnya dijadikan sebagai acuan dalam mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang ada.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu hanya meneliti pada fokus masalah konsep demokrasi, humanis, dan pendidikan Islam dalam konteks yang terpisah. Adapun beberapa penelitian yang substansinya relevan dengan penelitian dimaksud diatas antara lain:

1. Agus Mahfud

”Pendidikan Islam Berbasis Demokrasi Ajaran KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Studi Situs di Madrasah Tsanawiyah Negeri Gembong Kabupaten

³³ Lexy J. Moleong, *Penelitian, Ibid*, hlm. 103.

Pati).” Tesis. Magister Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tentang pendidikan Islam berbasis demokrasi ajaran KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) studi situs di Madrasah Tsanawiyah Negeri Gembong Kabupaten Pati. Fokus dalam penelitian ini adalah; 1) Bagaimana karakteristik konsep pendidikan Islam di MTs. Negeri Gembong Pati, 2) Bagaimana penerapan ajaran KH Abdurrahman Wahid di MTs. Negeri Gembong Pati, dan 3) Bagaimana kontribusi ajaran KH Abdurrahman Wahid terhadap pendidikan Islam berbasis demokrasi di Madrasah Tsanawiyah Negeri Gembong Pati.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan strategi penelitian etnografi. Pengumpulan data diperoleh melalui pengamatan, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Data diperoleh dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru yang lain dan siswa. Juga diperoleh dari kegiatan sekolah, dan berbagai dokumen yang terkait dengan fokus penelitian.

Hasil temuan dari penelitian menunjukkan bahwa pertama, inti pendidikan Islam adalah berangkat dari agama Islam itu sendiri, yakni tujuannya adalah untuk membentuk manusia yang sempurna. Kedua ajaran KH. Abdurrahman Wahid tentang pendidikan Islam berbasis demokrasi nampak dari gagasannya untuk mengubah visi dan misi pesantren yang modern dan egaliter. Ketiga implementasi ajaran KH Abdurrahman Wahid tentang pendidikan Islam berbasis demokrasi benar-benar diterapkan di MTs Negeri Gembong karena merupakan bagian dari pengelolaan madrasah dalam perencanaan kurikulum.

Oleh sebab itu sekolah harus memiliki struktur organisasi sekolah/madrasah yang tidak hanya melibatkan guru tapi juga seluruh elemen sekolah, termasuk orang tua atau komite, wali kelas, guru mata pelajaran, orang tua, dan juga instansi lain yang kompeten dalam dunia pendidikan.

2. Aprianto

(Suatu Kajian Berdasarkan Perspektif *Sains* dan *Humanistis*), Tesis ini berjudul “*Pemahaman Pendidik Terhadap Ruang Lingkup Ajaran Islam dan Kemampuan Merelevansikannya dalam Pembelajaran di SMA Muhammadiyah 2 Padang*” yang ditulis oleh Aprianto NIM. 027044 merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan pada Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Kosentrasi Pendidikan Islam.

Objek penelitian tesis ini adalah Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah 2 Padang yang merupakan salah satu sekolah (amal usaha) yang dimiliki oleh Muhammadiyah Kota Padang yang terletak di Jalan Ujung Belakang Olo No. 17 Kelurahan Olo Kecamatan Padang Barat. Penetapan sekolah ini penulis jadikan sebagai objek penelitian tesis didapatkan dari informasi yang diterima bahwa pembelajaran yang dilaksanakan oleh pendidik di SMA Muhammadiyah 2 Padang berupaya untuk direlevansikan dengan konsep ruang lingkup ajaran Islam, sehingga peserta didik memiliki nilai tambah dan mempunyai wawasan dengan perpaduan ilmu yang diajarkan di kelas dengan konsep ajaran Islam secara menyeluruh. Maka pembelajaran di SMA M 2 Padang ini diasumsikan bahwa pendidik telah memiliki pemahaman yang mendalam

tentang ruang lingkup ajaran Islam serta dapat melaksanakannya dalam pembelajaran yang dilaksanakan di kelas.

Pembahasan tesis ini difokuskan pada pemahaman pendidik terhadap ruang lingkup ajaran Islam dan relevansinya dalam pembelajaran di SMA M 2 Padang dengan pembahasannya diarahkan pada; *pertama* pemahaman pendidik terhadap aspek aqidah, ibadah, akhlak dan mu'amalah, *kedua*, kemampuan pendidik merelevansikan ruang lingkup ajaran Islam dalam pembelajaran, dan *ketiga*, Usaha Sekolah dan Majelis Dikdasmen PDM Kota Padang dalam pemahaman ajaran Islam terhadap pendidik. Sebagai tulisan ilmiah, tesis ini bertujuan; *pertama* mendeskripsikan data yang akurat mengenai pemahaman pendidik terhadap ruang lingkup ajaran Islam yang meliputi aspek aqidah, ibadah, akhlak dan mu'amalah, *kedua*, mendeskripsikan data yang akurat mengenai kemampuan pendidik merelevansikan ruang lingkup ajaran Islam dalam pembelajaran, *ketiga*, mendeskripsikan data yang akurat tentang usaha sekolah dan Dikdasmen PDM Kota Padang dalam pemahaman ajaran Islam terhadap pendidik.

Penelitian yang dilakukan dalam tesis ini menggunakan *metode kualitatif* dengan alasan bahwa penelitian ini bersifat *deskriptif* yang memusatkan perhatian terhadap gejala menurut apa adanya tentang bagaimana pemahaman pendidik terhadap ruang lingkup ajaran Islam dan relevansinya dalam pembelajaran di SMA M 2 Padang. Teknik pengumpulan data, penulis menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Teknik analisis data dengan menggunakan metode *content analysis*, dengan cara memproses informasi secara

sistematis yang telah didapatkan dari pendidik, Kepala Sekolah, Ketua Majelis Dikdasmen PDM Kota Padang dan peserta didik.

Agus Mahfud, dalam tesis yang berjudul "*Pendidikan Islam Berbasis Demokrasi Ajaran KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Studi Situs di Madrasah Tsanawiyah Negeri Gembong Kabupaten Pati*)," melakukan analisis pemikiran dan konsep demokrasi perspektif KH. Abdurrahman Wahid, kemudian mencari relevansi dalam aplikasi karakteristik konsep pendidikan Islam di MTs. Negeri Gembong Pati, 2.

Adapun, Aprianto pada tesis yang berjudul "*Pemahaman Pendidik Terhadap Ruang Lingkup Ajaran Islam dan Kemampuan Merelevansikannya dalam Pembelajaran di SMA Muhammadiyah 2 Padang*" (Suatu Kajian Berdasarkan Perspektif *Sains* dan *Humanistik*), penelitian dilakukan untuk mendeskripsikan pemahaman pendidik terhadap aspek aqidah, ibadah, akhlak dan mu'amalah, mendeskripsikan kemampuan pendidik merelevansikan ruang lingkup ajaran Islam dalam pembelajaran, dan mendeskripsikan tentang usaha sekolah dan Dikdasmen PDM Kota Padang dalam pemahaman ajaran Islam terhadap pendidik, yang berdasarkan perspektif humanistik.

Sedangkan dalam tesis yang berjudul "*Pendidikan Demokrasi dan Humanis dalam Pendidikan Islam*" ini, adalah deskripsi analisis konsep pendidikan yang bersifat religius, demokratis, dan humanis dalam sebuah *Tinjauan Konsep Pendidikan*. Pendidikan demokrasi dan humanis dalam pendidikan Islam di maknai sebagai pola pendidikan yang lebih memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya secara

optimal, lebih menekankan pada transformasi nilai-nilai, dan lebih berorientasi pada proses dari pada tujuan. Adapun, dalam desain pembelajaran komponen (afektif, kognitiv, dan psikomotorik), pembelajaran dilakukan secara seimbang dan integral.

Dengan demikian, terlihat jelas perbedaan antara ketiga penelitian di atas, baik dari segi rumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi, dan hasil penelitian. Persamannya hanya pada esensi konsep dasar dari permasalahan penelitian. Agus Mahfud, dalam tesis yang berjudul "*Pendidikan Islam Berbasis Demokrasi Ajaran KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Studi Situs di Madrasah Tsanawiyah Negeri Gembong Kabupaten Pati*," melakukan analisis pemikiran dan konsep demokrasi perspektif KH. Abdurrahman Wahid. Sedangkan, Aprianto pada tesis yang berjudul "*Pemahaman Pendidik Terhadap Ruang Lingkup Ajaran Islam dan Kemampuan Merelevansikannya dalam Pembelajaran di SMA Muhammadiyah 2 Padang*" (Suatu Kajian Berdasarkan Perspektif *Sains* dan *Humanistik*), penelitian dilakukan untuk mendeskripsikan pemahaman pendidik terhadap aspek aqidah, ibadah, akhlak dan mu'amalah, dalam perspektif konsep humanistik.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan uraian secara jelas, maka penulis menyusun tulisan ini menjadi enam bagian (bab) yang secara sistematis adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, meliputi pembahasan antara lain; a) Latar belakang masalah, b) Rumusan Masalah, c) Definisi Istilah, d) Tujuan Kajian, e) Kegunaan

Kajian, f) Metode Kajian, g) Penelitian Terdahulu, dan h) Sistematika Penulisan.

Bab II Demokrasi dalam pendidikan, meliputi pembahasan antara lain; a)Teori demokrasi dalam pendidikan, b) Manusia dalam pendidikan Demokrasi, c) Tujuan pendidikan demokrasi, d) Metode pendidikan demokrasi, e) Guru dalam pendidikan demokrasi, f) Siswa dalam pendidikan demokrasi.

Bab III Humanisme dalam Pendidikan, meliputi pembahasan antara lain; a)Teori humanisme dalam pendidikan, b) Manusia dalam pendidikan humanisti, c) Tujuan pendidikan humanistik, d) Metode pendidikan humanistik, e) Guru dalam pendidikan humanistik, f) Siswa dalam pendidikan humanistik.

Bab IV Paradigma Pendidikan Islam, meliputi pembahasan antara lain; a) Hakikat pendidikan Islam, b) Kurikulum pendidikan Islam, c) Demokrasi dan humanisme dalam pendidikan Islam, d) Kerangka berfikir demokrasi dalam pendidikan Islam, e) Kerangka berfikir humanistik dalam pendidikan Islam, f) Format pendidikan yang demokratis dan humanistik dalam pendidikan Islam.

Bab V Implementasi Pendidikan Demokratis dan Humanistik dalam Pendidikan Islam, meliputi pembahasan antara lain; a) Kurikulum yang demokratis dan humanistik dalam pendidikan Islam, b) Guru yang demokratis dan humanistik dalam pendidikan Islam, c) Desain pembelajaran yang demokratis dan humanistik dalam pendidikan Islam, d) Evaluasi yang demokratis dan humanistik dalam pendidikan Islam.

Bab VI Penutup meliputi pembahasan antara lain; a) Simpulan dan, b) Saran.